

PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA

Dewi Fitria Anggraeni¹, Fadlurrahman, M.P.A²

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Jl, Kapten Suparman 39
Potrobangsang Magelang

Email : dewinugraha@gmail.com

²Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar
e-mail: Fadlurrahman@untidar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam mengembangkan objek wisata dan mendeskripsikan kendala atau hambatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam mengembangkan objek wisata. Penelitian dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan berupa analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Dalam Pengembangan Objek Wisata telah dijalankan sesuai dengan teori Pitana dan Gayatri (2005) mengenai peran Pemerintah Daerah yang terdiri dari motivator, fasilitator, dan dinamisor meskipun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal karena masih ada kendala atau hambatan yaitu Anggaran, SDM (Sumber Daya Manusia), SDA (Sumber Daya Alam), kurangnya promosi, kurangnya investor dan regulasi.

Kata Kunci : Peran Pemerintah Daerah, Pengembangan Objek Wisata

1. PENDAHULUAN

Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mencari dan memanfaatkan potensi yang ada di daerah. Salah satunya adalah mengembangkan potensi objek wisata. Sejalan dengan itu maka perlu adanya pengembangan dari sumber daya tersebut terutama pada sumber daya yang mempunyai potensi objek wisata yang menjanjikan,

pembangunan objek wisata pada suatu tempat erat kaitannya dengan pembangunan suatu daerah dimana tempat obyek wisata itu berada.

Temanggung adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribu kota di Temanggung dan berbatasan dengan Kabupaten Kendal di utara, Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Magelang di selatan, serta Kabupaten Wonosobo di barat. Peneliti tertarik dengan salah satu sektor yang ada di Kabupaten Temanggung yaitu sektor pariwisata, karena

Kabupaten Temanggung memiliki potensi sektor pariwisata yang besar untuk dikembangkan. Kabupaten Temanggung mempunyai tempat wisata yang cukup banyak, dengan memanfaatkan potensi pariwisata daerah lokal yang ada tentunya dapat menguntungkan bagi Pemerintah Daerah karena mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan perekonomian daerah.

Usaha pariwisata merupakan kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha barang pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut. Industri pariwisata adalah suatu susunan organisasi, baik pemerintah maupun swasta, yang terkait dalam pengembangan produksi dan pemasaran produk suatu layanan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang berpergian pariwisata di daerah-daerah sangatlah banyak bila mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada, pemerintah dan masyarakat daerah saling membantu dalam pengembangannya tersebut sehingga akan mengangkat segi ekonomi, budaya dan pendidikan daerah itu. Pengembangan pariwisata dapat diartikan sebagai suatu proses pengembangan di daerah tujuan wisata. Bentuk pengembangan pariwisata dapat berupa pengembangan atraksi atau

obyek wisata, pengadaan dan rehabilitas sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan di bidang pemasaran dan promosi serta bentuk lainnya. Pariwisata adalah salah satu cara yang dapat mengatasi masalah kesejahteraan bila dikembangkan secara profesional.

Masalahnya adalah Kabupaten Temanggung “diapit” oleh dua kabupaten yang memiliki potensi wisatanya lebih dikenal orang, khususnya turis asing. Terutama Candi Borobudur (Kabupaten Magelang) dan Dataran Tinggi Dieng (Kabupaten Wonosobo) sehingga Temanggung lebih sering dijadikan kota Ampiran atau Daerah Antar Tujuan Wisata (DATW), belum sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW). Umumnya, wisatawan lokal maupun mancanegara melewati Temanggung setelah mengunjungi Semarang-Dieng atau Yogyakarta-Borobudur-Dieng. Pemerintah Daerah berkeinginan mengubah posisi Temanggung menjadi daerah tujuan wisata.

Pembangunan dan pengembangan objek wisata Temanggung menjadi salah satu tumpuan pada Ekonomi Kerakyatan dan berorientasi global yang berakar pada nilai-nilai agama, budaya, lingkungan hidup, persatuan dan kesatuan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang dinamis dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan

perekonomian kerakyatan dan pertumbuhan kawasan yang dinamis sehingga Temanggung bukan lagi menjadi Daerah Antar Tujuan Wisata (DATW) tetapi dapat dijadikan Daerah Tujuan Wisata (DTW). Mengembangkan potensi wisata daerah sehingga keberadaannya mampu menjadi Obyek Wisata atau Kawasan Wisata sebagai realisasi upaya menjadikan Temanggung sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW). Ikut mendorong terciptanya Citra Positif Kepariwisata dengan didukung Sumber Daya Manusia Pariwisata yang memadai akan mendorong tumbuhnya simpul-simpul kegiatan wisata yang melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dan mempunyai rasa memiliki sehingga obyek wisata terus berkembang.

Kabupaten Temanggung memiliki khazanah pariwisata yang lengkap, mulai dari wisata alam, wisata pegunungan pendakian, wisata budaya, wisata buatan, dan desa wisata. Mengunjungi Temanggung tak bisa lepas dari sejarah. untuk memburu wisata Temanggung bukan hanya tentang keindahan alam dan daya tarik berbagai tempat wisatanya saja, namun juga tentang berbagai sejarah Temanggung. Sejarah-sejarah ini ada di berbagai tempat wisata. Berwisata menikmati keindahan tempat bisa sekaligus menelisik tentang berbagai sejarah Temanggung yang ada di dalamnya.

Kenyataannya saat ini adalah masih banyak objek wisata di Kabupaten temanggung yang belum tergali, banyak objek wisata yang belum dikenal, akses jalan menuju objek wisata kurang memadai, serta sarana dan prasaranya juga kurang menarik wisatawan.

Berbagai upaya harus dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sebagai pihak pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kebudayaan dan pariwisata mengingat program atau kegiatan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung adalah program yang mengacu pada perkembangan pariwisata khususnya objek wisata sehingga Kabupaten Temanggung menjadi Kabupaten yang menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) tidak lagi menjadi Daerah Antar Tujuan Wisata (DATW). Hal tersebut menjadi kewajiban instansi pemerintah bidang kebudayaan dan pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam rangka pencapaian tata kelola pengembangan kepariwisataan yang baik. Tata kelola pengembangan kepariwisataan yang baik merupakan harapan maupun cita-cita dari seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat maupun swasta agar pariwisata di Kabupaten Temanggung semakin maju dan berkembang pesat.

Dari Uraian diatas, peneliti ingin menganalisis mengenai “Peran Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Dalam Pengembangan Objek Wisata” dengan lokasi penelitian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Publik

Keban (2014: 100) berpendapat bahwa Manajemen Publik adalah suatu spesialisasi yang relatif baru, tetapi berakar dari pendekatan normatif. Pelopor dari manajemen publik adalah Woodrow Wilson penulis “The Study of Administration” di tahun 1887. Fokus dalam ajaran Wilson adalah melakukan perbaikan fungsi eksekutif dalam tubuh pemerintahan karena waktu itu dinilai telah berada di luar batas kewajaran sebagai akibat dari merebaknya gejala korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan mengadopsi prinsip manajemen bisnis.

Wilson dalam Keban (2014: 100) meletakkan 4 (empat) prinsip dasar bagi studi administrasi publik yang mewarnai manajemen publik sampai sekarang yaitu :

1. Pemerintah sebagai setting utama organisasi
2. Fungsi eksekutif sebagai fokus utama
3. Pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi, dan

4. Metode perbandingan sebagai suatu metode studi dan pengembangan bidang administrasi publik.

2.2. Peran

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu (Soekanto, 2013: 212).

Duverger (2010:103) berpendapat bahwa Istilah “peran” (role) dipilih secara baik karena diya menyatakan bahwa setiap oarang adalah pelaku didalam masyarakat dimana diya hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor- aktor profesional.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang di maksud dengan Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah. Menurut Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2017, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pariwisata sesuai dengan aturan yang berlaku. Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung adalah untuk kelancaran dalam pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Temanggung maka perlu adanya peran dari pemerintah. Sedangkan peran pemerintah dalam pengembangan Pariwisata difokuskan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Menurut Pitana dan Gayatri dalam (Pitana dan Gayatri, 2005: 95), mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai :

- a) Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Pemerintah, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.
- b) Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan

segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.

- c) Dinamisator, dalam pilar good governance agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

2.3. Pengembangan

Pengembangan adalah suatu strategi yang dipergunakan untuk memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar objek dan daya tarik wisata maupun bagi pemerintah (Paturusi, 2001:23).

Pengembangan adalah suatu proses atau cara yang menjadikan sesuatu menjadi maju, baik, sempurna, dan berguna (Poerwadarminta, 2002:474).

2.4. Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah wisata (Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).

World Tourism Organizations (WTO) mendefinisikan pariwisata adalah berbagai aktivitas yang dilakukan orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal di luar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk kesenangan, bisnis dan keperluan lain (Muljadi, 2009:8-9).

Objek wisata merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat dinikmati dan menimbulkan kesan tersendiri pada diri seseorang apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai (Bakaruddin, 2008:30-31).

Pengertian Objek dan daya tarik wisata menurut Marpaung (2002:78) adalah suatu bentukan dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu.

3. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan

menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam mengembangkan objek wisata dan Mendeskripsikan kendala atau hambatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam mengembangkan objek wisata. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang di dasarkan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:124). Dengan teknik ini peneliti dapat memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang lengkap.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskriptif Lokasi Penelitian

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung beralamat di Jalan A. Yani Nomor 32 Temanggung. Dinas ini merupakan Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan yang menjadi

kewenangan Daerah dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang kebudayaan dan pariwisata serta fungsi yang diemban maka diperlukan suatu perencanaan yang matang, terarah, tepat sasaran, berkelanjutan dengan didukung oleh berbagai pihak/stakeholder dalam suatu waktu yang terukur.

4.2. Analisis Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung mempunyai peran penting dalam pengembangan objek wisata. Kabupaten Temanggung pada saat ini masih menjadi Daerah Antar Tujuan Wisata (DATW) belum menjadi Daerah Tujuan Wisata sehingga peran dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dapat membantu mengubah Kabupaten Temanggung menjadi Daerah Tujuan Wisata.

Untuk menganalisis Peran Pemerintah Daerah Khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung peneliti mengkaji dengan teori menurut Pitana dan Gayatri (2005) dan Serta dapat mendeskripsikan hambatan atau kendala dalam pengembangan objek wisata yang akan dibahas sebagai berikut :

a. Motivator

Peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar masyarakat dapat

sadar akan pentingnya pariwisata, selain itu untuk stakeholder lain seperti swasta peran motivator diperlukan agar geliat usaha di bidang pariwisata terus berjalan dan meningkatnya jalinan kerja sama yang baik antara seluruh stakeholder. Untuk membangun pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism maka yang perlu ditingkatkan adalah peran motivator agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun swasta. Dinas perlu berperan aktif dan agresif untuk memainkan peran motivator demi terbangunnya pengembangan objek wisata.

- Pembinaan Desa Wisata

Pembinaan desa wisata merupakan salah satu program kerja dan merupakan tugas pokok yang dilaksanakan oleh Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung khususnya pada bidang pariwisata, ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk pembinaan desa wisata, tujuannya agar masyarakat dalam pengembangan objek wisata dapat memaksimalkan dan mengembangkan secara mandiri dengan memanfaatkan potensi objek wisata yang ada. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan untuk membina desa wisata:

• Studi banding

Studi banding merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan yang

akan diterapkan kedepannya untuk menjadi lebih baik. Kegiatan seperti ini tentunya sangat bagus bagi perkembangan suatu kebutuhan yang diharapkan sebagaimana mestinya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung selalu mengadakan studi banding dan mengajak para pelaku pengembangan pariwisata ke desa wisata atau objek wisata yang sudah maju supaya dapat memodifikasi dan menerapkan segala sesuatunya di objek wisata atau desa wisata mereka sendiri.

- Pelatihan dan Pendampingan

Dalam pengembangan objek wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung melakukan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat sekitar objek wisata dari awal penyusunan (planning), pelaksanaan kegiatan sampai finalisasi pariwisata terbentuk seperti kegiatannya, administrasinya, struktur organisasinya, data dukungnya dan lain-lain.

- Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi selalu dilakukan oleh beberapa Pemerintah Kota atau Kabupaten untuk membina dan memotivasi masyarakat sehingga menjadikan daerah mereka menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW). Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung telah melakukan sosialisasi ke berbagai daerah tujuan wisata di Kabupaten Temanggung secara berkala untuk memotivasi para pelaku pengembangan objek wisata, tujuannya adalah agar mereka memahami bagaimana cara melayani para pengunjung, bagaimana manajemen dan mengatur keuangan dalam pengelolaan objek wisata atau destinasi wisata, bagaimana mengatur struktur organisasi mereka, dan lain-lain terkait dengan pengembangan objek wisata atau destinasi wisata dan desa wisata.

- b. Fasilitator

Fasilitas wisata dapat diartikan suatu sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pengelola untuk kebutuhan wisatawan. Kebutuhan wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam atau keunikan objek melainkan memerlukan sarana dan prasarana wisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung berupaya untuk memfasilitasi penunjang sarana dan prasarana, selain itu dinas juga memfasilitasi promosi obyek wisata, sampai dengan pemeliharaan objek wisata atau destinasi wisata.

- Penyediaan Sarana dan Prasarana

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten temanggung dalam hal penyediaan sarana dan prasarana

menyerahkan penuh kepada pelaku objek wisata atau destinasi wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya memberikan atau membantu sejumlah dana atau anggaran dalam pengembangan objek wisata dan desa wisata jika ada yang mengajukan dan meminta untuk dikembangkan melalui surat, WhatsApp, telepon maupun datang langsung, namun juga dalam pemberian bantuan tersebut harus memenuhi kriteria yang ada seperti memiliki potensi yang dapat dijual dan dikembangkan, didukung oleh stakeholder, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan kelembagaan yang ada di desa, sarpras sudah memenuhi sehingga dapat di tindak lanjuti serta dapat di danai, karena pada dasarnya Pariwisata di Kabupaten Temanggung berbasis masyarakat sehingga dikelola dan dikembangkan sendiri oleh masyarakat dalam membangun sarana dan prasarannya karena merupakan kewenangan Desa. Sarana dan prasarana yang dibangun oleh masyarakat melalui dana dari pemerintah adalah kamar mandi, mushola, tempat sampah, penyediaan bangunan tidak permanen untuk berwirausaha, tempat parkir, perbaikan akses jalan menuju objek wisata dan berbagai pendukung-pendukung pariwisata lainnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung hanya memfasilitasi sarana dan prasarana pada

beberapa objek wisata buatan dan objek wisata yang telah ikut dikelola oleh provinsi serta objek wisata perlu ditangani Pemerintah Daerah seperti Situs Liyangan, Rest area Kledung, Taman Kartini, Monumen Meteroit dan lain-lain, sarana dan prasarana yang disediakan seperti ruangan satpam, mushola, kamar mandi, peralatan kebersihan, gudang, gazebo, dan penunjang pariwisata lainnya.

- Promosi Wisata

Promosi adalah kegiatan memberitahukan produk atau jasa yang hendak ditawarkan kepada calon konsumen atau wisatawan yang dijadikan target pasar. Kegiatan promosi idealnya dilakukan secara berkesinambungan melalui beberapa media yang dianggap efektif dapat menjangkau pasar, baik cetak maupun elektronik. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam hal promosi objek wisata maupun destinasi wisata Melalui leaflet, website pemerintah Kabupaten Temanggung di <http://laman.temanggungkab.go.id/info/detail/4/53/pariwisata.html>, booklet, melalui java promo, menyediakan stand-stand dalam setiap event-event wisata dan mengikuti Pekan Raya Jakarta untuk melakukan promosi secara nasional dan internasional.

- Pemeliharaan Objek Wisata

Dalam meningkatkan daya tarik wisatawan, perlu adanya peningkatan pemeliharaan dan kualitas fasilitas dari objek

wisata di Kabupaten Temanggung. Seperti halnya yang sering terjadi di banyak daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung melakukan pemeliharaan terhadap objek wisata atau destinasi wisata seperti perbaikan sarana dan prasarana yang rusak namun pada objek wisata buatan dan objek wisata atau destinasi wisata yang langsung ditangani oleh Pemerintah Daerah dan merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten.

c. Dinamisor

Dalam pilar *Good Governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata di Kabupaten Temanggung memiliki peran untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

Sebagai upaya dinamisasi antar stakeholder pengembang pariwisata di Kabupaten Temanggung, Dinas Pariwisata selama ini telah melakukan berbagai hal terkait dengan kerja sama antar sektor, baik itu sektor swasta, sektor pemerintahan lainnya, maupun masyarakat.

- Kerjasama dengan Berbagai Sektor
 - Swasta

Kerjasama dengan pihak swasta merupakan hal yang penting dilakukan untuk pengembangan objek wisata karena sebagai penunjang dalam kegiatan berpariwisata wisatawan, untuk pemerintah Daerah akan menguntungkan dari segi meningkatnya pendapatan asli daerah dan untuk pihak swasta akan memberikan peningkatan dalam pendapatan bisnis mereka.

Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam pengembangan objek wisata dengan pihak swasta adalah dengan menggandeng restoran, hotel, maupaun biro perjalanan di Kabupaten Temanggung, sehingga orang yang berwisata di Kabupaten Temanggung dapat merasakan kenyamanan selama berwisata. Selain itu juga bekerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia dan Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA). Dalam pengembangan pariwisata harus mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang nantinya bermuara pada pemberian manfaat ekonomi bagi industri pariwisata, Hotel sebagai sarana akomodasi umum sangat membantu para wisatawan yang sedang berkunjung untuk berwisata dengan jasa penginapan yang disediakan oleh hotel termasuk juga sarana akomodasi lain seperti restaurant dan biro perjalanan.

- Organisasi Pemerintah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung menjalin kerjasama dengan berbagai dinas terkait untuk penunjang perkembangan pariwisata contohnya terkait dengan akses jalan menuju tempat wisata dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dalam perjalanan wisata tentu membutuhkan oleh-oleh sebagai cendramata untuk kerabat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung menggandeng Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk berkoordinasi mengunjungi UMKM, Bappeda, DPMPTSP, selain itu bekerja sama dengan mengikuti java promo, java promo adalah forum kerja sama pengembangan pariwisata sembilan Kabupaten/Kota, di antaranya Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Sleman, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan Kota Yogyakarta.

- Masyarakat

Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam kaitannya dengan masyarakat adalah masyarakat menyediakan usaha sendiri seperti homestay dan tugas Dinas disini

adalah memberikan informasi terkait dengan homestay yang ada di objek wisata sehingga wisatawan tidak khawatir dengan jarak yang ditempuh untuk menginap dan berwisata dengan hal tersebut juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

4.3. Kendala atau hambatan dalam Pengembangan Objek Wisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam mengembangkan objek wisata sehingga mengubah Kabupaten Temanggung menjadi Daerah Tujuan Wisata dalam menjalankan perannya terdapat kendala dan hambatan diantaranya adalah masalah Anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA). Kurangnya Media Promosi, Kurangnya investor, Regulasi.

- Anggaran

Salah satu yang menjadi kendala mengapa pembangunan tidak berjalan dengan baik adalah dana dari pemerintah daerah untuk pariwisata sangat minim.

Dalam pengembangan Objek Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung mengalami kendala masalah dana karena sejauh ini pendanaan untuk objek wisata dan desa wisata masih cukup sehingga tidak bisa memaksimalkan pengembangan objek wisata yang ada. Dalam hal Anggaran atau pendanaan ini juga berpengaruh terhadap sarana dan prasarana

yang ada karena anggarannya terbatas maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tidak dapat menambah sarpras hanya memperbaiki bukan untuk memaksimalkan, selain itu Dinas kesulitan dalam mengatur pembagian pembangunan pariwisata yang ada di tiap daerah.

- Sumber Daya Manusia

Masyarakat di sekitar objek wisata adalah yang akan menyambut kehadiran wisatawan tersebut dan sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan oleh para wisatawan. Untuk ini masyarakat di sekitar objek wisata perlu mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Dalam hal ini pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung telah menyelenggarakan berbagai pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun pada implementasinya beberapa dari mereka tidak mengikuti kegiatan tersebut karena mindset mereka yang belum memiliki kesadaran tentang pariwisata, masih banyak pengelola atau pelaku pariwisata belum mempunyai pengetahuan untuk mengelola dan mengembangkan objek wisata termasuk dalam melayani pengunjung, masyarakat juga belum mengenal dan mempraktekkan manajemen wisata yang baik manajemennya masih sederhana, masyarakat juga belum memiliki kesadaran mempromosikan objek

wisata desanya. Dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung jumlah dari stafnya sangat minim sehingga masih kurang optimal pengembangan pariwisatanya.

- Sumber Daya Alam

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam pengembangan objek wisata terkendala karena akses jalan dan jarak antar objek wisata yang jauh dan sulit sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung membutuhkan waktu yang lama dalam pengembangan objek wisata atau destinasi wisata selain itu juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sulit mengembangkan beberapa objek wisata dikarenakan tanah yang ingin dikembangkan masih milik masyarakat maupun perhutani.

- Kurangnya Media Promosi

Media Promosi dalam Pengembangan objek wisata maupun destinasi wisata dalam pemasarannya adalah hal yang penting dilakukan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung untuk mengembangkan objek wisata atau destinasi wisata adalah meningkatkan jumlah pengunjung namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam media promosinya belum menggunakan promosi secara digital,

media yang digunakan pun masih terbilang sangat sederhana seperti leflet, booklet, website pun masih menggunakan website dari pemerintah daerah belum memiliki website sendiri selain itu Dinas juga belum mengelola Media Sosial untuk media promosi padahal era saat ini dengan media sosial akan mempopulerkan objek wisata maupun destinasi wisata sehingga otomatis akan meningkatkan pengunjung. Kurangnya media promosi disebabkan oleh kurangnya pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung yang hanya memiliki 2 staf. Terbatasnya pegawai juga akan mempengaruhi pemaksimalan dalam mempromosikan objek wisata.

- Kurangnya Investor

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam pengembangan objek wisata saat ini masih belum adanya investor karena hal itu terkait dengan kebijakan dan Komitmen Kepala Daerah. Selain itu juga berhubungan terkait dengan Regulasi yang masi berubah-berubah.

- Regulasi

Regulasi adalah hal yang paling penting karena regulasi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri terkendala dalam pengembangan objek wisata karena regulasi seperti RIPPDA (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah)

sampai saat ini dalam tahap revisi-revisi jadi sulit untuk mengembangkan pariwisata karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung perlu mensinkronkan antara RIPPDA (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah) dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) sehingga dapat megembangkan objek wisata ataupun destinasi wisata secara maksimal. Peraturan dari Kepala Daerah juga menentukan berjalannya perkembangan objek wisata maupun destinasi wisata jika Kepala Daerah menyetujui maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan melanjutkan pengembangan yang disetujui.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan tahapan-tahapan dalam penelitian, maka dapat menyimpulkan hasil penelitian dengan judul “Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam Pengembangan Objek Wisata”, sebagai berikut:

- a. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung :

- 1. Motivator

Peran Motivator Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam pengembangan objek wisata kurang optimal karena

dalam kenyataannya belum ada peran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung untuk memotivasi para pelaku usaha untuk berperan aktif dalam pengembangan objek wisata maupun destinasi wisata.

2. Fasilitator

Peran Fasilitator pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam pengembangan objek wisata belum maksimal dan optimal karena penyediaan sarana dan prasarannya belum merata, dalam memasarkan produk-produk unggulan juga masih dilakukan secara sederhana.

3. Dinamisator

Peran Dinamisator pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam pengembangan objek wisata belum optimal karena dalam bekerja sama dengan beberapa sektor tidak ada perjanjian resmi seperti MOU (Memorandum of Understanding)

b. Kendala atau hambatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam pengembangan objek wisata

Dalam pengembangan objek wisata menuju Daerah Tujuan Wisata (DTW)

mengalami banyak kendala diantaranya adalah Anggaran yang masih terbatas sehingga belum mampu mengembangkan objek wisata secara maksimal dan optimal, SDM (Sumber Daya Manusia) dari para pelaku objek wisata atau destinasi wisata yang masih rendah dalam melayani pengunjung dan belum memiliki pengetahuan yang lebih mengenai manajemen pengelolaan pariwisata, SDA (Sumber Daya Alam) yang dalam pengembangan objek wisata sangat jauh dan sulit medannya, kurangnya media promosi karena media promosi yang dilakukan masih terbilang sederhana, kurangnya investor dan pada regulasi yang masih selalu diperbaiki.

5.2. Saran

Setelah selesai melakukan penelitian, maka peneliti memberikan saran:

1. Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung perlu mengadakan sosialisasi atau pembinaan terhadap pelaku swasta. Dinas perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat pelaku objek wisata mengenai teknis bagaimana cara meminta bantuan dana kepada Pemerintah Daerah sehingga akan menggali dan memperbanyak objek

wisata yang ada di Kabupaten Temanggung.

2. Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung perlu menyediakan sarana dan prasarana secara merata disemua objek wisata, selain itu DISBUDPAR dalam pemasaran objek wisata atau destinasi wisata perlu menggunakan media sosial atau pemasaran promosi berbasis aplikasi sehingga objek wisata atau destinasi wisata dapat dikenal lebih luas. Dinas dapat menerapkan “kampong blogger” dalam bidang pengembangan pariwisata jadi setiap desa yang memiliki objek dapat memasarkan objek mereka masing-masing melalui blog dalam sebuah komunitas.
3. Dalam pengembangan pariwisata perlu adanya dokumen Legal atau Memorandum of Understanding (Mou) tentang kerjasama dengan pihak-pihak swasta karena sejauh ini kerjasamanya belum ada hitam diatas putih. Dinas perlu menekankan lebih mengenai Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) karena CSR

bersifat wajib untuk kepentingan masyarakat maka dengan CSR ini dapat membantu dalam pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Temanggung.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bakaruddin. 2008. *Perkembangan Permasalahan Kepariwisataaan*. UNP Pres, Padang.
- [2] Duverger, Maurice. 2010. *Sosiologi Politik*. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- [3] Keban, Yermias. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Gava Media, Yogyakarta.
- [4] Marpaung, Happy. 2002. *Pengantar Pariwisata*. Alfabeta, Bandung.
- [5] Muljadi, A.J. 2009. *Kepariwisataan dan Perjalanan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [6] Paturusi, Samsul Alam. 2001. *Perencanaan Tata Ruang Kawasan Pariwisata, Materi Kuliah Perencanaan Kawasan Pariwisata Program Magister (S2) Kajian Pariwisata, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar*, Bali.
- [7] Pitana, I Gede dan Gayatri, Putu G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Andi, Yogyakarta.
- [8] Poerwadarminta, W.J.S. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- [9] Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Rajawali, Jakarta.
- [10] Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- [11] *Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*.